

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.akurat.co
Media Cetak	

## Penundaan Pembayaran TKD PNS di Jakarta Seharusnya Bisa Dihindarkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) imbas anjloknya anggaran Pemda DKI karena wabah Covid-19. Besaran pembayaran TKD yang ditunda adalah 25 persen dengan total nominal mencapai Rp2 triliun.

Gubernur Anies Baswedan sudah menerbitkan Aturan Gubernur (Pergub) 49/2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Salah satu poin dalam pergub itu adalah melunasi utang TKD pada anggaran 2021 mendatang.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian Gilbert Simanjuntak menyebut, penundaan pembayaran TKD ini bisa saja dihindarkan andai saja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya skala prioritas.

"Soal TKD itu masalah membuat prioritas, misalnya TGUPP versus ASN atau versus Formula E," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (2/5/2020).

Baru-baru ini, masyarakat dibikin geger soal isu Tunjangan hari raya (THR) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov yang disebut-sebut tak dipangkas sepeserpun. Pejabat Pemprov DKI kemudian ramai-ramai membantah isu tersebut.

Sebelum isu THR TGUPP jadi omongan, di awal-awal musim Pandemi Gubernur Anies Baswedan juga sudah berulang-ulang didesak DPRD DKI Jakarta untuk menarik kembali uang komitmen atau commitment fee penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Legislator Kebon Sirih berpendapat uang sebesar Rp207,69 miliar (asumsi 1 pounds sebesar Rp18.881) yang telah dibayarkan pada awal 2020 kemarin bisa menopang perekonomian DKI saat ini.

"Semuanya menjadi beban, tapi mau dianggarkan apa tidak adalah keputusan pak Anies berpihak kemana," tuntas Gilbert.